

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Afandi, 2005, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.
- _____, 2010 *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1* Kencana, Jakarta,.
- _____, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni.
- Dameria Sinaga, 2014, *Buku Ajar Statistik Dasar*, Jakarta Timur, UKI Press.
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap Dari Klasik sampai Postmoderenisme*, Jogjakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- H. Fajri Ismail, dkk., 2018, *Pedoman Pelaksanaan Perwalian*, Lembaga Penjaminan Mutu, Palembang.
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Diktat Han, Universitas Panji Sakti.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Jakarta, Kencana.

- _____, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia.
- Nurhendro Putranto, 2013, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Edisi Revisi.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Djambatan.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, Airlangga University Press.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Soesilowati Mahdi, dkk., 2005, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.Surini Ahlan Sjarif, 1986, *Intisari Hukum Waris*, Jsakarta, Ghalia Indonesia.
- Syahril Sofyan, 1994, *Hukum Waris ditinjau dari sudut praktek di BHP*, Medan, Makalah.Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

JURNAL

- Al Mulia, Mudzakirah, Anwar Borahima, and Winner Sitorus. "Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh

Notaris." Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong 8.1 (2022).

Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Otentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2021): 188-206.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2023, *Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas*, Jurnal Hukum Justice, Volume 1 Nomor 1, hlm. 43- 44.

Halim, Jassica, Ahmadi Miru, and Nurfaidah Said. "Authority To Act Husband or Wife in Making a Deed of Testamentary Estate (Legaat) on Joint Property in Marriage." *Awang Long Law Review* 5.1

(2022): 60-72.

Henry Restu Putra, dkk., 2022, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung*, Management Studies and Enterpreneurship Journal, hlm. 1896

Imaniar Putri Novianti. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. Pandecta Volume 10. Nomor 1.

Indana Sari Zulfa. 2022. *Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak Studi Kantor Balai Harta Peninggalan Medan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ingat Riang Tafonao dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2023. *Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas Warisan Anak*. Volume 1 Nomor 2

Liman, Padma D., and Aulia Rifai. "Analysis of the Legal Basis of Marriage Agreements and Their Implications for the Position of Inheritance Property." *Jurnal Hukum* 40.1: 141-155.

Moh. Kurniawan. 2018. *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Daulat Hukum. Volume 1 Nomor 1.

Ranggapandu Cindarputera dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. *Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Volume 6 Nomor 3.

Shela Natasha. 2019. *Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian*. Majalah Hukum Nasional Nomor 2.

Tjiong, Ardy Chandra, Winner Sitorus, and Sakka Pati. "Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah perwalian." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (2021).

Yuda Pradipta Ananda. 2020. *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Pihak Ketiga Di Balai Harta Peninggalan*. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 26 Nomor 2.

Yulita Dwi Pratiwi. 2019. *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1 No. 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

WEBSITE

Diki Pranata Kusuma, Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara, Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. Diakses melalui laman, <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan
<https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/balai-harta-peninggalan>

[https://makassarbhp.wixsite.com/bhpmakassar/visi- dan-misi](https://makassarbhp.wixsite.com/bhpmakassar/visi-dan-misi)

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur>

ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-pengampuan>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pembukaan-wasiat-tertutup-rahasia-dan-pendaftaran-wasiat-umum>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-tak-terurus-onbeheerde-nalatenschap>

WAWANCARA

Andi Lola Rosalina, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Brilian Thioris, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Efraim Tana, Kurator Keperdataan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar

Hustam Husain, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Muh. Erwin, Pegawai Balai Harta Peninggalan Kota Makassar

Oryza, Ketua Balai Harta Peninggalan Kota Makassar

R. Mohammad Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Ria Trisnomurti, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Sukwanto Tandi, Notaris dan PPAT di Kabupaten Gowa

Syarif, Perancang Undang-undang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Tjhin Jefri Tanwil, Notaris dan PPAT di Kabupaten Gowa